TERORISME: ISIS (1)

Oleh Shohibul Anshor Siregar

Negeri ini sedang tidak stabil. Apa pun retorika yang dipilih untuk mencoba menutupinya. Kalau saja bisa mengurangi kadar ketidak-stabilan ini, perlulah diperbanyak publikasi kegiatan yang ringan-ringan presiden seperti selama ini tampaknya cukup digandrungi oleh media mainstream. Mana tahu efektif. Pertajam pesan-pesan tertentu dari setiap publikasi itu. Misalnya ke arena dekonstruksi, baik dengan sasaran pengukuran kesan kuat sebagai presiden dengan kesederhanaan atau kebersahajaan. Presiden dengan kepedulian berlebihan. Presiden dengan kemerakytan yang luar biasa.

Putra Presiden Jokowi, Kaesang, juga boleh dimintai memproduksi lebih banyak dan lebih beraneka video khusus yang ringan-ringan tentang bapaknya. Dulu ia memublikasi video sedang main panco dengan bapaknya. Juga pernah disiarkan video potong rambut bapaknya di sekitar Bogor.

Perbenturan yang kurang lebih dapat disebut berorientasi pada rivalitas perebutan titik-titik simpul hegemoni politik, ekonomi dan budaya sedang berlangsung di Indonesia. Akarnya ada pada kesenjangan yang sangat parah dan negara tidak tahu sama sekali jalan keluar. Hal ini sudah cukup lama menghasilkan ketegangan serius.

Saya mencatat peran media yang sejak reformasi sudah sangat terkonsentrasi di tangan segelintir penguasa modal. Posisi pemilik modal ini sangat berkepentingan mempertahankan status quo, karena memang mereka bagian dari penguasa ekonomi itu. Di tangan mereka wacana yang kurang masuk akal sekali pun tentang radikalisme, terorisme dan semacamnya dapat diframing menjadi opini publik. Kita tahu di zaman perang maupun di zaman stabil, media menjadi alat politik yang sangat efektif.

Hasilnya lihatlah, orang-orang non muslim atas nama pribadi mau pun lembaga kerap memiliki keberanian luar biasa menista Islam dan jika tersangkut masalah hukum seperti Ahok, opini malah diarahkan lagi untuk menyudutkan Islam sebagai anti NKRI, intoleran, anti kebhinnekaan dan anti Pancasila. Anda bisa memonitornya sendiri dari pemberitaan media maupun wacana yang berkembang pada media sosial.

Bayangkanlah, tahun lalu umat Islam di salah satu kota besar di Pulau Jawa dituduh anti pluralitas karena menolak perayaan budaya etnis tertentu, yang mengagungkan dewanya, untuk diselenggarakan di halaman sebuah masjid Agung. Saya tahu halaman rumah dinas Walikota atau alun-alun tersedia di kota itu dalam ukuran sangat luas dan mampu menampung ribuan massa. Tetapi mengapa tetap ingin dipaksakan di kawasan masjid Agung? Aparat resmi Negara pun terlibat di situ, kendati disebut sebagai penengah saja.

Ini memang sebuah kelanjutan Islamophobia dalam versi yang lebih serius. Meski berbeda posisi dengan di Amerika Serikat, namun konstruk Islamophobia di Indonesia yang justru berpenduduk mayoritas muslim benar-benar meningkat drastis. Ini semakin menjelaskan akar masalah. Bahwa tak hanya Snouck Hurgronje telah berhasil menata keindonesia dalam kaitannya dengan keberagamaan (Islam).

Keadaan di negeri Mandela (Afrika Selatan) bisa ditarik sebagai perbandingan meski tidak 100 % mirip. Tetapi dalam interaksi hegemonik kelas tertentu dan penguasa yang mendukungnya terhadap rakyat jelata, kesamaannya segera lebih kelihatan. Kita di sini

memiliki sejarah buruk soal penjajahan yang mendiskriminasi mayoritas. Maka semua pelopor pergerakan kita dalam pergerakan kebangsaan adalah ekstrimis dan teroris di mata penguasa. Sebutlah si Jiih atau si Pitung. Ribuan jumlah tokoh seperti itu di berbagai wilayah Indonesia tempohari yang hingga kini tak sempat dibukukan sejarahnya dengan baik. Filem Naga Bonar pastilah sebuah pengecualian yang mencerminkan kepeloporan lokal dalam menentang hegemoni penguasa kolonial.

Lepas dari penjajahan asing yang dilakukan oleh para bapak republik, ternyata keadaan tidak dapat dipulihkan oleh pemerintahan yang dibentuk sendiri. Malah cita-cita kemerdekaan tidak identik dengan capaian. Maka jika akhir-akhir ini di Amerika efek kebijakan anti-Muslim dan retorika antiimigran pemerintahan Trump telah menyebabkan kekerasan oleh kelompok Supremasi Kulit Putih terhadap Muslim, imigran, ataupun warga lain yang berbeda warna kulitnya, di Indonesia terasa Islam, muslim dan segenap simbol dan warisan budayanya, seolah alineatif dan seolah tak bersambungan dengan kehidupan negara. Apalagi belakangan ini dunia dilanda isu ISIS, Boko Haram dan sebelumnya Al-Qaeda.

Opini publik itu dahsyat. Bisa memutar-balikkan fakta. Menurut Investigative Fund di Nation Institute dan Reveal from the Center for Investigative Reporting, Amerika Serikat, antara tahun 2008 sampai tahun 2016 trend aksi terorisme yang terjadi di negeri Paman Syam, bukanlah oleh pelaku yang terkait dengan kelompok Islam yang mana pun. Tetapi di tangan Donald Trump keadaan bisa menjadi lain.

Seorang mantan anggota CIA, Graham E Fuller dalam bukunya Seperti apakah dunia tanpa Islam? (A world without islam) telah menjelaskan kondisi yang sesungguhnya. Dalam buku tersebut, Fuller menanyakan apakah dunia akan lebih damai dan menjadi tempat yang lebih baik? Umumnya orang di Barat akan menjawab: Tentu. Tanpa Islam, pasti tidak terjadi Perang Salib, konflik Israel-Palestina, aksi bom bunuh diri, dan Peristiwa 11 September. Bukankah Islam sumber dari semua tragedi itu?

Graham Fuller menawarkan sebuah eksperimen berpikir untuk menguji pandangan itu. Dengan analisis historis yang serius, dia menyusun sebuah skenario alternatif seandainya Islam tidak pernah ada dan mempengaruhi jalannya sejarah. Kesimpulan-kesimpulannya di luar dugaan: Tanpa Perang Salib, Barat tetap akan menyerbu Timur Tengah karena nafsu imperialisnya. Gereja Ortodoks akan mendominasi Timur Tengah dan mungkin sampai hari ini tetap berkonflik dengan Gereja Roma dan Dunia Barat.

"India tidak akan sekaya sekarang tanpa warisan budaya Islam Mughal. Tidak akan ada Taj Mahal. Aksi bom bunuh diri akan tetap terjadi, karena bukan Muslim yang pertama kali melakukannya. Melalui penuturan yang segar, provokatif, sekaligus mencerahkan, Fuller menunjukkan sumber sebenarnya dari konflik yang merobek dunia saat ini".

Pada hari yang sama kedatangan Raja Salman ke Jakarta, Dr Zakir Naik pun tiba, pada sore harinya. Ia luput dari pantauan media dan mungkin itu yang dikehendakinya dalam agenda kunjungannya di Indonesia. Menarik sekali ketika berbicara di depan publik di sebuah tempat yang dirancang terbuka untuk umum hingga orang non-muslim pun dipersilakan bahkan menjadi prioritas untuk bertanya atau mendebat Dr Zakir Naik. Berikut sebuah petikan pidatonya.

Saya sudah berada di Indonesia beberapa hari. Saya penasaran apa yang dilakukan hukum di sini. Kau tahu di Negara asalku India, kami umat muslim adalah minoritas. Pemerintah kami

berkata bahwa kami hanyalah 14 %, tetapi saya mengatakan 20 %, dan siapa pun memaksa siapa untuk berpindah agama, dia akan langsung ditangkap. Dipenjarakan.

Negaramu Indonesia bukan Negara minoritas muslim. Mayoritasnya adalah 88 % muslim. Di Malaysia, Islam adalah agama Negara. Padahal penduduk muslim di sana hanya 61 %. Dan Malaysia itu adalah Negara tetangga bagi Indonesia. Hanya 61 % penduduk muslim.

Kalian memalukan, 220 juta jiwa, dan 41 juta sisanya berusaha memaksamu pindah agama, sisanya 12 % memaksamu dan kau tak melakukan apa-apa, hanya duduk-duduk saja.

Allah menakdirkanmu lahir di sini. Kau memiliki kekuatan voting, bukan? Apa yang terjadi dengan muslim di Indonesia?

Saya diberitahu beberapa tahun lalu bahwa di sini orang menjalankan Islam jumlahnya kurang. Tetapi setelah berada di sini beberapa hari, saya menyaksikan ada percikan dari wajah para anak muda. Saya melihat ada gelombang yang mendekat Al-Quran dan sunnah.

Saya tidak menyuruhmu berkelahi dengan non muslim. Allah berfirman dalam surah Mumtahanah (60) ayat 8: “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena agamamu dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu”.

Tetapi ayat berikutnya surah Mumtahanah (60) ayat 9 berkata: “Tetapi jika orang-orang kafir memerangi agamamu dan mengusirmu dari negerimu, maka Allah melarangmu berbuat baik kepada mereka”.

Secara umum muslim harus baik kepada non muslim. Bantu mereka. Peduli kepada mereka. Lindungi mereka ketika membutuhkan. Tetapi jika non muslim memerangimu dan mengusirmu dari negerimu, Allah melarangmu duduk-duduk saja, tak melakukan apa-apa.

Jumlah penduduk yang sangat besar. Allah melarangmu berlaku baik kepada mereka. Pada setiap ceramah saya di sini saya sudah mendengar beberapa orang berkata “aku telah dipaksa keluar dari Islam”.

Mungkin Allah punya rencana mengirimku ke sini saat ini. Dan aku diberitahu oleh sebagian orang Indonesia: “saudara Zakir, Indonesia Negara yang berbeda. Hati-hati kalau bicara”. Hati-hati apa? Saya datang ke sini untuk menyampaikan Al-Quran.

Saya datang ke sini untuk menyampaikan pesan Al-Quran di Negara berpenduduk muslim besar. Jika saya tak melakukannya, maka Allah akan mencabut kemampuan bicaraku dariku.

Di hampir semua Negara di dunia jika kau mengeluh kepada polisi, bahwa seseorang memaksamu berpindah agama, dia akan di penjarakan. Itu berlaku di hampir semua Negara di dunia, baik muslim maupun non muslim.

Saya meminta muslim Indonesia, kalian adalah pemeluk agama terbaik di dunia. Allah menyebutmu “khayra ummah” (umat terbaik) dalam surah Ali Imran (3) ayat 110. “Kami adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia”.

Kita umat terbaik. Allah memberikan kita kehormatan. Tetapi tidak ada kehormatan tanpa tanggungjawab. Allah menyebut tanggungjawab itu ialah “menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.

TERORISME: ISIS (2)

Oleh Shohibul Anshor Siregar

Kata PBB dalam dokumen (2015) “Seventieth session Agenda items 16 and 117 Culture of peace The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy Plan of Action to Prevent Violent Extremism”, violent extremism (kekerasan bersifat ekstrim) adalah penghinaan terhadap tujuan dan prinsip badan dunia yang didirikan pasca perang dunia ke 2 itu.

Tidak ada keraguan sama sekali, bahwa violent extremism merongrong perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Juga, semua pihak tak bisa memungkiri bahwa tidak ada satu negara atau wilayah di bawah kolong langit yang kebal dari dampaknya.

Setidaknya ada pengakuan terus terang yang tercermin dari dokumen PBB berjudul “The present Plan of Action to Prevent Violent Extremism” ketika disebutkan perlunya mempertimbangkan mengapa dan kapan violent extremism itu menjadi begitu kondusif bagi terorisme. Selain diakui sangat beragam, violent extremism itu sendiri juga tampaknya hingga kini tetap dibiarkan tanpa definisi yang jelas.

Mengapa? Ada nilai dan pandangan politik yang memperumitnya, dan PBB menjadi bagian yang terpenting dan bertanggungjawab untuk kenaifan yang diabadikan itu. Fenomena violent extremism ini juga bukan hal baru dalam sejarah manusia (ingat saja kisah anak Adam Habil dan Qabil) dan sama sekali tidak dapat dipandang sebagai hal eksklusif, baik dilihat dari wilayah, kebangsaan atau sistem kepercayaan manapun.

Lalu mengapa dalam beberapa tahun terakhir kelompok teroris seperti Negara Islam di Irak dan Levant (ISIL), Al-Qaida dan Boko Haram begitu hebat merubah persepsi dunia dengan telah berhasil membentuk citra violent extremism dan perdebatan tentang bagaimana mengatasi ancaman ini? Sangat jelas bahwa faktor ketidaktahuan tentang kelompok-kelompok ini (baik dilihat dari aspek keterkaitan religious dan politik maupun budaya dan sosial) memiliki konsekuensi drastis bagi banyak wilayah di dunia. Penyesatan informasi juga berperan menambah buruk keadaan.

Sangatlah terasa bagi dunia akan pentingnya penjelasan yang baik terhadap ISIL, Boko Haram dan AL-Qaeda. Ketika jembatan runtuh saat hujan turun, jangan-jangan ada yang akan mengaitkannya dengan ISIL. Padahal negaranya yang tak tahu bagaimana membangun jalan yang baik akibat kebobrokan yang parah hingga korupsi menjadi dasar bagi kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya sendiri. Boleh jadi seorang yang sudah sangat tak mampu lagi menanggung beban penderitaan akibat tekanan social ekonomi, dengan gelap mata melakukan hal-hal buruk di tengah masyarakat. Orang ini bisa dikaitkan dengan ISIL, karena pemegang orotitas seakan terdorong hebat berkehendak untuk itu.

Memang ada jejaring mendunia sebagai keprihatinan bersama dalam menghadapi violent extremism itu. Tak sedikit biaya dialokasikan. Agendanya juga bermacam-macam, tetapi jelas tak dengan transparansi yang cukup. Begitulah Al-Qaeda dianggap begitu berbahaya

dan bahkan telah mengukirkan sebuah tragedi kemanusiaan besar melalui teror 911 di Amerika. Hal-hal seperti ini bisa tak terhingga jumlahnya di seluruh dunia, dan tak selalu masuk akal untuk dikaitkan sebagai pekerjaan sesiapa tertentu. Itu yang menyebabkan di hampir semua tempat di dunia ini keraguan tetap saja muncul.

Tuduhan insidejob (pekerjaan yang dirancang sendiri) juga cukup kuat. Media-media arus utama tak ketiggalan dalam pemeranan diri. Arah mereka jelas, tak hendak melakukan sesuatu kecuali pemingkai (framing) yang menyesatkan opini publik dunia.

Berbagai Negara di dunia memiliki interest dan bahkan agenda khusus (tersendiri) dalam menyikapi fenomena violent extremism ini. Itu sudah pasti. Kerap tanpa alasan kelompok tertentu dikait-kaitkan. Lucunya ada mobilisasi pendapat yang dikerjakan sistematis. Alih-alih menanggulangi ISIS, mengenalnya saja pun tidak, malah menimbulkan masalah baru berupa instabilitas akibat pancingan untuk saling curiga dan saling memusuhi di antara komponen bangsa.

LewRockwell.com dalam situsnya yang mengusung motto “anti-state, anti-war dan pro-market”, tanggal 20 Agustus 2016 menurunkan hasil investigasi Roger Stone berjudul “How We Know ISIS was Made In The USA”. Kelihatannya laporan itu memiliki kesamaan substansi dengan yang dibuat oleh James H. Fetzer sebelumnya pada tanggal 20 Januari 2016.

James H Fetzer adalah Profesor Emeritus dari Universitas McKnight yang sejak akhir 1970-an bekerja untuk spesialisasi dalam menilai dan mengklarifikasi bentuk dan dasar penjelasan ilmiah, kemungkinan dalam sains, filsafat pikiran, dan filsafat sains kognitif.

Sedangkan Roger Stone adalah mantan konsultan spesialis penelitian oposisional Republik, penulis buku *The Man Who Killed Kennedy: The Case Against LBJ*; *Nixon's Secrets: The Rise, Fall and Untold Truth about the President, Watergate, and the Pardon*; *The Clintons' War on Women*; dan karya terakhirnya *Jeb and the Bush Crime Family*.

How We Know ISIS was Made In The USA memulai kisahnya dengan sebuah lead yang menunjukkan validitas data yang digunakan, bahwa berdasarkan permintaan Freedom of Information Act, Judicial Watch dapat memperoleh salinan direktif Badan Intelijen Pertahanan (DIA) yang telah memulai pembentukan ISIS pada tahun 2012.

Laporan DIA menyatakan bahwa "Negara-negara Teluk Barat, Dan Turki yang Mendukung Oposisi Suriah Menetapkan dukungan atas Prinsip Salafi yang Dinyatakan di Bawah atau Diasingkan di Suriah Timur dalam rangka mengisolasi rezim Suriah".

Ketika itu, kata Rogers Stone, bahkan Judicial Watch sendiri tampaknya tidak menghargai pentingnya dokumen ini. Terbukti dengan nada siaran persnya yang terfokus pada serangan Benghazi.

Rilis terbaru dari email Hillary yang pernah dihebohkan terutama saat pilpres Amerika, terlebih lagi, mengonfirmasikan bahwa mengambil Assad tidak ada hubungannya dengan dugaan penyalahgunaan orang-orang Suriah tapi karena ini akan membantu Israel.

Orang tak mungkin lupa bahwa Hillary menjadi Sekretaris Negara dari tahun 2009 sampai 2013. Obama resmi menjadi presiden terpilih Amerika pada tahun 2008 dan mengakhiri masa

jabatannya pada tahun 2016. Karena itu bagaimana mungkin bisa terjadi tanpa persetujuan mereka. Mereka benar-benar menciptakan ISIS, tegas Roger Stone.

Serangan kimia terhadap warga Suriah pada 21 Agustus 2013 dimaksudkan untuk membenarkan pelemparan rudal jelajah ke Suriah. Obama sudah siap, tapi orang Amerika tidak, dan ketika taktik itu dibantah oleh berkas setebal 50 halaman yang diberikan Rusia kepada PBB, mereka menggunakan "Rencana B", yang merupakan penciptaan ISIS oleh DIA. Senjata kimia tersebut diyakini secara luas telah diberikan kepada "pemberontak", namun rilis baru-baru ini dari email Hillary menunjukkan bahwa dia mengarahkan pengiriman senjata dari Libya ke Suriah dan senjata kimia mungkin termasuk di antaranya.

Serangan Benghazi tampaknya telah dimulai karena Duta Besar Christ Stevens khawatir bahwa beberapa senjata yang dikirim ke Suriah dapat digunakan untuk melawan penduduk sipil.

Pemerintahan Obama telah membungkam pertanyaan mengenai apakah Benghazi ada kaitannya dengan aktivitas mentransfer senjata ke pemberontak. Itu berarti "Ya!". Khabarnya tanda-tanda itu ada di sana sepanjang jalan, tapi media tak selera saja melaporkannya.

Foto-foto anggota ISIS bertato serdadu Amerika malah banyak ditemukan dan dengan mudah dapat diakses secara online. Begitu pun foto Senator John McCain bersama Abu Bakr al-Baghdadi yang tak ayal di Washington sendiri konon sudah luas dikesankan bahwa ISIS itu sebetulnya (dikenal luas) adalah "tentara John McCain".

ROHINGYA (Bagian 1 dari 3 tulisan)

Oleh Shohibul Anshor Siregar

Kita ingat konflik panjang ini mulai menahapi kekerasan fisik yang meluas pada bulan Juni 2012. Eskalasi berlangsung hingga tahun 2013, dan tidak kunjung reda hingga kini. Melihat kenyataan empiris itu, agaknya tak seorang bisa memberi jaminan apakah nanti akan terjadi hal lebih buruk melebihi yang pernah terjadi, terutama jika pemerintah negeri diskriminatif ini tak diberi ganjaran keras oleh mekanisme internasional.

Banyak opini menyebutkan konflik ini sebagai konflik etnis belaka, yaitu antara sebuah etnis minoritas yang kebetulan beragama Islam dengan mayoritas yang kebetulan beragama Buddha. Konflik serupa ini ada di mana-mana, tidak begitu istimewa. Begitu kira-kira kesimpulan yang ingin ditawarkan. Opini seperti itu cenderung menguat, dan di Indonesia bahkan sedang dipaksakan oleh pihak-pihak tertentu menjadi *mainstream*.

Anehnya, desakan meminta Negara untuk bersikap tanggap telah diidentifikasi sebagai "penggorengan politik" untuk menyudutkan Negara, khususnya Presiden Joko Widodo. Sebuah sikap yang wajib dicurigasi hanya bisa muncul dari watak barbar, dan sangat bertentangan dengan klaim kosong selama ini "saya Indonesia saya Pancasila".

Pada lain pihak, umumnya para pemimpin dan komunitas Buddha di Indonesia, sebagai salah satu komunitas minoritas yang secara akal sehat memang akan cukup terganggu dengan kasus Rohingya ini, berusaha memilah sedemikian rupa. Bahwa kejadian buruk itu secara normatif dianggap terklasifikasi dalam ranah tertentu, bukan dalam ranah agama, dan tak merepresentasikan watak umat mereka seluruhnya. Arahnya jelas, semoga tak ada sikap yang

tak bersahabat dari umat Islam yang mayoritas di Indonesia, dan memang itu sebaiknya tak perlu terjadi. Umat Islam Indonesia dan dunia pun mestinya bersikap seperti itu selagi norma kemanusiaan masih dihargai.

Konflik Agama

Konflik ini sangat sukar untuk tidak diidentifikasi sebagai konflik agama. Dokumen Human Right Watch (2013) yang diberi judul “All You Can Do is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State” mengutip dialog seorang Rohingya dengan seorang tentara yang dimintai tolong dan perlindungan dari keganasan yang tak terperikan.

Laporan ini mencatat ucapan tentara, demikian: “The only thing you can do is pray to save your lives” (Tak ada yang dapat kau lakukan kecuali hanya berdoa untuk keselamatanmu). Yakin atas keterlibatan institusi resmi, dokumen ini kemudian merekomendasikan agar segera, dan secara tidak memihak, menyelidiki orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius ini dan menuntut mereka secara adil sampai tingkat tertinggi, terlepas dari pangkat atau jabatannya. Juga sangat perlu diteruskan dengan pembentukan mekanisme internasional independen untuk menyelidiki pelanggaran (berat) hukum hak asasi manusia. Dokumen ini juga merekomendasikan secara kuat revisi undang-undang untuk memastikan negara menjunjung tinggi hak Rohingya dan Muslim lainnya, sembari segera menghapus semua pembatasan kebebasan bergerak populasi Rohingya. Undang-undang Kewarganegaraan 1982 wajib menghilangkan ketentuan yang diskriminatif atau semangat yang memiliki dampak diskriminatif terhadap penentuan kewarganegaraan karena alasan etnisitas, ras, agama atau status yang (seogyanya) terlindungi lainnya. Semua itu memerlukan transisi yang sekaligus kondisi tertentu seperti penyediaan akses kemanusiaan yang aman dan tidak terhalang untuk badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan internasional ke semua populasi di Negara bagian Arakan.

Kelihatannya rekomendasi itu tidak pernah terlaksana. Mekanisme internasional juga macet. Di berbagai Negara ada yang meminta perhatian ASEAN, misalnya agar solidaritas yang selama ini didengungkan keras dapat didayagunakan. Rupanya ASEAN tak memiliki nurani untuk hal semacam ini. Mungkin para pemimpin Negara-negara ASEAN hanya ingin berbicara ekonomi dan mereguk keuntungan atas hasil siasat dan tipu daya sesama dalam arus dan semangat globalisasi yang dipaksakan untuk memihaki siapa yang perkasa dan itu tentu sekaligus amat mencemaskan. Agaknya, ASEAN titik sampai di situ.

Konflik ini berbasis sentimen agama juga dioperoleh dari narasi N. Morada dalam “ASEAN, The Rohingyas And Myanmar’s Responsibility To Protect” (Vol. 2 No.9, 2012). N.Morada mencatat serius bahwa target penyerangan orang-orang Buddha tidak hanya orang-orang muslim dari etnis Rohingya saja, tetapi juga orang-orang muslim dari suku lain seperti Kaman (Kamein).

Meski tak sedahsyat derita Rohingya, laporan Mang Suan Kim “Religious Persecution In Myanmar Persists Despite Reforms” menjelaskan bahwa penganut agama Kristen juga tak luput dari sasaran kejahatan di Myanmar. Di Negara Bagian Chin populasi mayoritas Kristen menghadapi tantangan dan batasannya sendiri. Tidak ada perbaikan kebebasan beragama, pihak berwenang menghancurkan salib selama rezim militer dan terus melakukannya atas perintah instansi pemerintah. Di Karen, orang-orang Kristen mendapat

ancaman dari nasionalis Buddhis yang bahkan dengan arogan membangun pagoda ilegal di halaman gereja.

Konferensi Waligereja Myanmar yang terdiri dari berbagai komisi, agensi, dewan dan badan lainnya yang beranggotakan 16 keuskupan Myanmar, atas kekerasan anti-Muslim tahun 2013, memberanikan diri mengeluarkan sebuah pernyataan yang mendesak pemerintah untuk melindungi, mempromosikan dan memenuhi hak-hak agama semua, terutama komunitas minoritas.

Semua orang mestinya menyadari bahwa manusia adalah aset terbesar yang memiliki Tuhan yang diberikan hak untuk pembangunan penuh yang difasilitasi oleh pendidikan gratis dan wajib. Bangsa ini telah dilukai oleh penolakan untuk menerima hak tradisional semua kelompok masyarakat adat, yang tinggal selama beberapa generasi di negara ini. Upaya-upaya politik untuk mengenali keunikan mereka, hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, hak pengelolaan sumber daya tidak berkelanjutan dalam sejarah Myanmar, yang memaksa penderitaan karena perang, konflik, perdagangan manusia, ancaman narkoba dan lain-lain.

Kemuliaan Buddhisme, begitu Konferensi itu menyindir, sebagaimana diucapkan dalam prinsip metta dan karuna yang bersinar, diperkuat melalui kata-kata belas kasih, cinta untuk orang-orang yang rentan dan menyambut semua sebagai saudara dan saudari, seolah tanpa bekas sama sekali. Konferensi sangat mengutuk kegiatan kekerasan para fundamentalis Buddha.

Bagi Konferensi berkah Tuhan untuk Myanmar berupa sumber daya alam harus dilindungi dan tidak dibuka untuk eksploitasi internasional. Hilangnya tanah petani miskin, konsesi lahan hingga kepentingan korporasi meminggirkan orang miskin yang semua itu memerlukan penegakan hak. Keanekaragaman agama adalah kekuatan Myanmar dan untuk mencairkan hak fundamental ini harus dilawan oleh semua pihak.

Dalam setiap konflik agama, banyak pakar telah memberi pandangannya. Setiap konflik berbasis agama kerap menjadi semakin rumit apabila melibatkan isu etnisitas (*ethno-religious conflict*) sebagaimana dijelaskan oleh J. Fox (2002) dalam karyanya *Ethnoreligious Conflict in the Late Twentieth Century: A General Theory* dan S.A. Kadayifci-Orellana (2009) yang dimuat dalam *Ethno-religious conflicts: Exploring the role of religion in conflict resolution*.

Ho-Won Jeong (2008) dalam “Understanding Conflict and Conflict Analysis” kiranya dapat menjadi sebuah pengantar yang lebih memudahkan pemahaman sejatinya sifat konflik serupa akan selalu sangat sulit diselesaikan, dan durasinya dapat sangat lama. Mengutip Brown (1988), Ho-Won Jeong juga meyakini bahwa norma membimbing individu di wilayah kehidupan sosial yang asing, berfungsi sebagai 'rambu-rambu' sedangkan sistem kepercayaan mempengaruhi cara menafsirkan perilaku orang lain dan situasi.

Perbedaan nilai mengungkapkan variasi dalam preferensi, atau prinsip-prinsip yang melekat pada pembelahan utama ideologi atau cara hidup sekaligus kerap merasionalisasi standar dan metode alokasi sumber daya, dan di pihak lain kepercayaan itu sendiri mendasari orientasi masyarakat, melegitimasi perilaku kelompok, dan sering didefinisikan dalam hal kepercayaan dan perspektif yang dimiliki tentang diri dan orang lain.

Konflik agama yang tak melibatkan isu etnis secara lebih khusus seperti antara Katolik dan Protestan saja begitu sulit beroleh penyelesaian, apalagi yang melibatkan etnis seperti yang menimpa Rohingya. Karena itu masuk akal jika Sandy Nur Ikfal Raharjo (2015) mengidentifikasi sama konflik Rohingya dengan konflik panjang Israel-Palestina yang melibatkan komunitas mendunia antara Islam dengan Yahudi, Irlandia Utara antara Katolik dan Protestan, Kashmir antara Islam dengan Hindu, Filipina Selatan antara Islam dengan Katolik, dan Thailand Selatan antara Islam dengan Buddha.

Kecemasan Buddha Myanmar mungkin terkait dengan populasi yang meningkat hampir semua agama “rivalnya”. Pertambahan jumlah itu terlihat jelas. Tahun 2013 tercatat lebih dari 3 juta orang Kristen di Myanmar, yang berarti 6,2 % dari total populasi. Sedangkan pada tahun 1983 hanya 4,9 %

TERORISME: ISIS (4)

Oleh Shohibul Anshor Siregar

Menurut laporan PBB “Seventieth session Agenda items 16 and 117 Culture of peace The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy Plan of Action to Prevent Violent Extremism”, selama dua dekade terakhir masyarakat internasional yang dikendalikan melalui unit negara-negara telah berusaha mengatasi apa yang disebut sebagai violent extremism terutama dalam konteks tindakan anti-terorisme berbasis keamanan.

Hal itu tak lain dari upaya yang secara langsung diadopsi sebagai tanggapan atas apa yang dinyatakan sebagai ancaman yang timbul secara eskalatif oleh kelompok-kelompok yang dinyatakan sebagai kelompok teror. Di sini ada catatan penting yang harus diberikan, bahwa violent extremism itu kelihatannya dianggap mencakup kategori manifestasi yang lebih luas dan ada risiko bahwa pembenaran penerapan tindakan kontra-terorisme yang terlalu luas itu telah dijadikan tameng untuk menyembunyikan sebuah agenda jahat untuk tujuan menyudutkan Islam. Ini dapat dilihat secara jelas dari tingkah-tingkah Negara-negara dan aparat yang mereka persiapkan untuk menghadapi apa yang disebut sebagai bahaya teror, meski selalu mendapat kecaman. Tetapi sebagian besar mereka tidak bersedia merevisi tindakan, apalagi cara pandang.

Dalam resolusi 2178 (2014) kelihatannya Dewan Keamanan telah sedikit berusaha membuat secara eksplisit kaitan antara violent extremism dan terorisme, sembari menekankan sesuatu untuk sekadar menggarisbawahi pentingnya tindakan yang sesuai dengan norma internasional dan mengakui perlunya tindakan pencegahan. Ada norma internasional yang sengaja diabaikan, dan lembaga internasional kelihatannya memilih lebih baik menonton saja atas penyimpangan-penyimpangan serius itu. Inilah yang diabaikan begitu saja sambil berusaha beretorika, menyembunyikan niat jahat yang sebetulnya sangat diinginkan.

Aneka bentuk dan skala violent extremism, yang dapat menjadi pemicu bagi munculnya situasi kondusif bagi pertumbuhan subur segala bentuk terorisme, nyata benar membutuhkan upaya bersama, termasuk mungkin harus lebih mengutamakan upaya mencegah radikalisis, rekrutmen dan mobilisasi individu ke dalam berbagai kelompok teror dan menjadi tokoh-tokoh diehard di sana.

Menyadari berbagai penyimpangan yang terjadi meluas di hampir seluruh Negara, maka

dalam resolusi Dewan Keamanan PBB ini diserukan agar Negara-negara anggota secara serius meningkatkan upaya melawan, dengan mengakui bahwa kerja sama internasional dan tindakan yang diambil untuk mencegah dan memberantas terorisme harus sepenuhnya mematuhi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PBB pun kelihatannya membiarkan diri sebagai institusi kebodohan besar yang sangat kejam. Bahwa untuk diketahui, hingga kini, untuk perumusan definisi terorisme dan violent extremism itu saja adalah sesuatu yang dianggap sebagai hak prerogatif Negara-negara anggota. Betapa pun itu bisa saja sangat bertentangan dengan semangat dan standar humanisme internasional. Meski PBB tak lupa menegaskan keniscayaan adanya konsistensi dengan kewajiban menerapkan seluruh tindakan yang berdasarkan hukum internasional, khususnya hukum hak asasi manusia internasional, tetapi semua itu sangat terasa sebagai retorika *double talk* (munafik) belaka.

Majelis Umum PBB memang telah mengambil pendekatan praktis untuk melawan terorisme melalui adopsi konsensus Strategi Penanggulangan Terorisme Global PBB. Tetapi Rencana Aksi yang digariskan justru menerapkan pendekatan amat praktis berdasarkan subjektivisme tertentu yang bisa tak bertepe, untuk alasan mencegah berbagai hal yang dianggap ekstremisme dan kekerasan, tanpa merasa berkewajiban menusahakan untuk menjawab pertanyaan tentang definisi yang benar tentang terorisme itu sendiri.

Dalam resolusi 2178 (2014) memang telah ditegaskan adanya kebutuhan untuk mengambil pendekatan yang lebih komprehensif. Hal ini mestinya mencakup tidak hanya tindakan kontra-terorisme berbasis keamanan yang berkelanjutan, tapi juga prioritas tindakan-tindakan pencegahan sistematis yang secara langsung menangani faktor-faktor luas yang pendorong violent extremism yang telah melahirkan kemunculan bentuk-bentuk kelompok baru yang dapat saja lebih ganas. Tetapi hingga kini resolusi ini tak berdaya atau dibiarkan tak berdaya sama sekali.

Dalam Piagam PBB, Negara-negara anggota sebetulnya telah memutuskan untuk mengambil tindakan kolektif yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian. Prinsip ini sudah benar adanya. Mestinya siapa pun dan Negara mana pun, wajib menjadikannya sebagai prioritas untuk memberi energi kembali pada tindakan-tindakan pencegahan yang rasional, termasuk dalam agenda pencegahan konflik bersenjata, kejahatan, bencana kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, dan kekerasan seksual terkait konflik, dan inisiatif-inisiatif khusus untuk menempatkan hak asasi manusia di atas segalanya.

Ada sejumlah rujukan yang menekankan perlunya membangun komitmen kolektif untuk melakukan pencegahan. Pertama, Laporan Panel Independent untuk Operasi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2015 (A / 70/95-S/2015/446). Kedua, laporan Kelompok Penasehat Pakar mengenai tinjauan arsitektur peacebuilding Perserikatan Bangsa-Bangsa (A/69/968-S / 2015/490). Ketiga, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan.

Jika semua itu diperhatikan, maka semestinya apa yang dimaksud membangun komitmen kolektif untuk tujuan-tujuan melakukan pencegahan haruslah diletakkan pada prioritas yang tak boleh ditawar. Hanya dengan begitulah pencegahan penyebaran violent extremism menjadi semakin relevan.

Boleh jadi dapat diidentifikasi sebagai sebuah progress yang penting dicatat, bahwa Strategi Penanggulangan Terorisme Global PBB telah diadopsi dengan suara bulat oleh Majelis Umum dengan resolusi 60/288. Dokumen kesepakatan ini secara eksplisit membahas pencegahan dan perkiraan implementasi yang seimbang pada keempat pilarnya, yakni: pertama, menanggulangi kondisi yang kondusif bagi terorisme; kedua, mencegah dan memberantas terorisme; ketiga, membangun kapasitas negara untuk memerangi terorisme dan memperkuat peran sistem PBB di dalamnya; dan keempat, memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk semua dan peraturan hukum saat melawan terorisme.

Tetapi PBB mencatat bahwa selama dekade terakhir, justru yang mendapat penekanan kuat dari keempat pilar itu hanyalah pada penerapan tindakan di bawah pilar kedua, sedangkan pilar pertama dan keempat terlalu sering diabaikan. Padahal menanggulangi kondisi yang kondusif bagi terorisme dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk semua dan peraturan hukum saat melawan terorisme mestinya dapat mereduksi keseluruhan masalah jika diprioritaskan secara sungguh-sungguh.

Di berbagai Negara seperti Indonesia, menjelang ulang tahun kesepuluh penerapan Strategi tersebut, pada tahun 2016, kenyataan tetap belum banyak berubah. Rakyat dibiarkan tidak perlu tahu apa agenda Negara, malah sebaliknya memelih memaksa rakyat wajib percaya atas semua tindakan Negara jika pun itu sesuatu hal yang sangat tidak masuk akal.

Seorang analis militer berpendidikan Barat dari Indonesia (Salim Said), baru-baru ini telah berbicara cukup menohok pada sebuah stasiun televisi Swasta Nasional sekaitan dengan kegandrungan melabeli setiap tindakan kekerasan sebagai pekerjaan ISIS. Selain mengkonfirmasi kaitan sejarah kepenjajahan negeri ini yang sesungguhnya adalah menjadi beban terberat sepihak bagi mereka yang beragama Islam, Salim Said memiliki kesamaan pandangan dengan Daniel S Lev.

Bagi Daniel S. Lev salah satu persoalan yang cukup pelik di Indonesia saat ini adalah bagaimana mengatasi ketegangan dalam hubungan antara negara dengan agama yang, faktanya, hal ini sekaligus terkonfirmasi secara meyakinkan tentang semakin menguatnya dominasi ekonomi, sosial dan politik yang melahirkan berbagai bentuk ketegangan kontestasi dan konflik yang tak seorang pun mampu mereduksi agar tak ditemalikan dengan agama tertentu.

Dominasi, terutama dalam bidang ekonomi, yang diikuti oleh dominasi politik dan budaya, lambat laun melahirkan rasa ketidak-adilan dan bahkan rasa keterampasan (relative deprivation). Mungkin ada orang atau golongan yang sangat mahir dan sudah sangat terlatih bersandiwara untuk memenangkan persaingan atas nama agama yang disamarkan sedemikian rupa, sedangkan yang lain tak terlatih untuk itu dan dengan demikian selalu akan menjadi korban yang potensial dikukuhkan dalam logika generalisasi yang sangat simplistik.

Daniel S Lev sudah barang tentu benar untuk satu hal, tetapi tidak untuk yang lain. Ia tak berdiri pada posisi yang dapat melihat semua variable yang menyebabkan kerumitan yang luar biasa ini. Karena itu, menuntut berbagai instrumen yang berkeinginan semakin mengokohkan pentingnya perumusan baru mengenai peran agama atau kerukunan beragama dalam pertumbuhan negara-bangsa untuk tujuan menekan sepihak, sangatlah tidak bijak. Orang selalu memilih untuk tak mampu dengan jujur melukiskan duka dalam peradaban terjajah secara ekonomi, politik dan budaya. Padahal dunia internasional semestinya kini

sudah mulai melakukan pertaubatan serius atas paradigma yang digunakan selama ini dalam memandang terorisme. Dangkal sekali, memang.

Belajar dari kasus-kasus yang sudah terjadi dalam kategori terorisme di Indonesia selama ini, agaknya Negara harus menyadari apa yang sedang menyimpannya. Negara pun tak boleh menjadi mainan bagi instrumen global yang tak menjamin keadilan yang hakiki. Para pemimpin umat Islam di Indonesia seharusnya menyadari kerugian besar memilih membangun arena besar saling tuding sembari secara tersamar saling memasang kuda-kuda untuk beroleh reward dari tukang ponten, atau pihak yang kurang lebih secara serampangan dan secara pragmatis dianggap patut dipertuan.

Ngomong-ngomong, Anda mau heran gak ya ketika di Indonesia disebut-sebut begitu meluasnya ISIS, namun pada saat yang sangat favourable seperti gelombang aksi terbesar (aksi superdamai 212) sebuah gelas pun tak pecah di arena? Atau ketika sebuah aksi terror di lumpuhkan di sekitar Sarinah (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo datang ke lokasi beberapa jam kemudian hanya dikelilingi oleh pengawal tanpa perangkat pengaman standard (padahal untuk meninjau proyek saja lazim Presiden Jokowi memakai baju rompi dan topi pengaman).

Jika dunia internasional mengaitkan ISIS sebagai ekspresi totalistas Islam yang brutal, maukah Anda ikut heran bersama saya ketika penistaan yang direstui dunia terjadi begitu dahsyat di Palestina dan ISIS itu tak tersinggung?

Penulis dosen FISIP UMSU. Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya ('nBASIS)